

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional. Total laut Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari 2,3 juta km² perairan kepulauan, 0,8 juta km² perairan teritorial dan 2,7 juta km² perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Posisi dan letak kepulauan Indonesia bersifat *archipelagic* karena terdiri dari 17.504 pulau dan didominasi dengan perairan. Dengan total luas laut dan posisinya tersebut menjadikan Indonesia sangat positif dalam sistem perdagangan dan penyedia bahan baku hasil perikanan laut bagi masyarakat nasional dan internasional (Apridar *et al.*, 2011).

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa partisipasi masyarakat dalam menjalankan program pembangunan selama ini memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Sejak pemerintahan Soeharto masyarakat sudah dilibatkan dengan bersifat “*top-down*” yaitu inisiatif penetapan kebijakan ditentukan oleh pemerintah sedangkan untuk pelaksanaan program sepenuhnya diserahkan ke masyarakat. Meskipun model ini memiliki keunggulan karena pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara cepat, namun kelemahan yang dijumpai adalah masyarakat sering merasa tidak memiliki dan tidak merasakan manfaat dari kegiatan pembangunan itu (Satries, 2011).

Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Pengembangan Usaha Mina Pedesaan diharapkan mendatangkan pertumbuhan kawasan perikanan dengan berjalannya sistem dan usaha minabisnis (Indiradewi dan Marhaeni, 2016).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memprioritaskan usaha pengolahan perikanan menjadi bagian penting untuk ditingkatkan dalam pelaksanaan pembangunan perikanan yang berdaya saing. Terbukti dari alokasi anggaran untuk pengembangan usaha pengolahan yang terus menunjukkan

peningkatan setiap tahunnya mengingat bahwa usaha pengolahan memiliki peran dalam peningkatan daya saing serta nilai tambah dari produk yang dihasilkan. **(Ditjen-P2HP, 2012 ; Ditjen-P2HP, 2014).**

PUMP bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) merupakan kegiatan pemberdayaan yang salah satu programnya adalah memfasilitasi bantuan pengembangan usaha bagi pengolah dan pemasar hasil perikanan kepada pelaksana program yaitu Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar). Program PUMP bidang P2HP bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Poklahsar dan mengembangkan wirausaha bidang pengolahan dan pemasaran perikanan di pedesaan dalam bentuk bantuan langsung masyarakat (BLM) untuk pembelian peralatan pengolahan dan pemasaran. Pola dasar PUMP-P2HP dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan wirausaha produktif Poklahsar. Indikator keberhasilan output dari PUMP-P2HP adalah: 1) Tersalurkannya BLM kepada 1.500 Poklahsar di 33 Propinsi; dan 2) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan Poklahsar melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan **(Ditjen-P2HP, 2013)** dengan jumlah bantuan sebesar Rp. 20,4 milyar pada tahun 2011 dan meningkat menjadi Rp. 75 milyar di tahun 2012 dan 2013 **(Ditjen-P2HP, 2014).**

Menurut hasil penelitian **Hikmayani dan Yulisti (2015)** PUMP-P2HP di Kabupaten/Kota penerima bantuan yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kab. Sukabumi, Kota Sibolga, dan Kab. Lombok Timur berdampak pada rata-rata pendapatan pengolah ikan. Pendapatan sebelum adanya program adalah Rp. 782.000/siklus pada pengolah ikan dengan pendapatan di bawah satu juta rupiah, dan Rp. 3.061.000/siklus pada unit pengolahan dengan pendapatan di atas satu juta rupiah. Setelah mendapatkan program, terdapat kenaikan pendapatan untuk seluruh unit pengolahan dan pemasaran di 9 lokasi penelitian tersebut yaitu Rp. 3.969.000/siklus atau meningkat sebesar 127% dan tidak ada poklahsar yang menghasilkan pendapatan di bawah satu juta rupiah.

Bantuan pemerintah dalam bentuk program insentif telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong produksi dan produktivitas pelaku usaha kecil. Dalam teorinya, pemberian subsidi input dapat

meningkatkan pendapatan dan mengurangi kendala kekurangan modal usaha pada pelaku usaha kecil. Namun, terkadang dampak dari keberhasilan program tersebut dapat dilihat dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga pendanaan pemerintah tersebut biasanya dilakukan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan (**Fan et al., 2009**).

Studi evaluasi program PUMP telah dilakukan oleh **Maengkom et al., (2015)**, yang menyatakan bahwa program tersebut telah memberikan dampak yang positif terhadap nelayan di kelurahan Tidore meskipun tujuan program tidak tercapai secara lengkap. **Maengkom et al., (2015)** juga berpendapat bahwa dampak tersebut berupa peningkatan pendapatan nelayan mengurangi ketergantungan mereka terhadap pemberi modal informal, serta menghasilkan keluaran berupa infrastruktur penangkapan ikan dan kelompok usaha bersama (KUB).

Berdasarkan hal tersebut di atas dan atas tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan usaha produktif, penggunaan anggaran yang cukup besar dari program PUMP bidang P2HP perlu dievaluasi seberapa besar dampak yang diciptakan dari implementasi program tersebut. Dengan demikian dapat diketahui keunggulan dan kelemahan program tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang sangat penting untuk perbaikan program secara lebih akurat, efektif dan efisien.

Sejauh ini belum ada hasil penelitian mengenai dampak program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) terhadap pendapatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di Kota Padang. Program PUMP bidang P2HP di Kota Padang dimulai pada tahun 2013 dan berakhir 2015. Terdapat 15 kelompok pengolah dan pemasar pemanfaatan program PUMP bidang P2HP di Kota Padang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti “**Analisa Dampak Dan Model Pengembangan Usaha Mina Pedesaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Pengolah Dan Pemasar Hasil Perikanan Di Kota Padang**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana dampak program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan terhadap pendapatan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan?
2. Bagaimana model pengembangan berkelanjutan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan?
3. Bagaimana strategi pengembangan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dampak program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan terhadap pendapatan masyarakat pengolah dan pemasar hasil perikanan.
2. Menganalisis model pengembangan berkelanjutan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan.
3. Menganalisis strategi pengembangan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan.